



Judul : Bangun wisata berbasis budaya
Tanggal : Jumat, 01 Desember 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

RUU Kepariwisataan Bangun Wisata Berbasis Budaya

KOMISI X DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan). Beleid ini berupaya memperkuat dan mempertajam beberapa substansi regulasi. Satu di antara substansi itu mengenai relasi hubungan budaya dan pariwisata di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan ke Panitia Kerja (Panja) Pariwisata.

Salah satunya berasal dari jajaran pimpinan Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Sahid, Politeknik Pariwisata Makassar, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

"Kami sedang berusaha menarik benang merah untuk menggabungkan budaya dan pariwisata. Jangan sampai budaya kehilangan ruh. Kami tidak ingin pariwisata di Indonesia hanya dijadikan hiburan saja," ucapnya dalam rapat Panja Pariwisata di DPR, Kamis (30/11/2023).

Hal ini menjadi sorotan lantaran pihaknya meyakini budaya yang lestari berpotensi menciptakan ciri khas pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Menemukan pola relasi budaya dan pariwisata untuk pembahasan RUU ini bukanlah hal yang mudah.

"Karena itu, kami juga mengundang berbagai macam pakar," tuturnya.

Berdasarkan laporan terbaru yang diterimanya, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, pariwisata di Indonesia masih sangat minim berorientasi pada culture-based tourism.

Dikhawatirkan, pariwisata di Indonesia akan kehilangan identitasnya. Karena itu, sinergi dan keterpaduan harus menjadi tolok ukur untuk menciptakan relasi kuat antara pariwisata dan budaya.

Nilai-nilai keseimbangan, sinergitas dan keberlanjutan dua sisi tersebut, lanjutnya, menjadi tolok ukur dalam membangun peradaban sektor pariwisata Indonesia ke depan.

Menurutnya, revisi undang-undang ini akan menekankan perlunya memasukkan substansi budaya dalam regulasi kepariwisataan, tanpa harus bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kemajuan kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sementara, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap, pengembangan sektor pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini merupakan langkah strategis yang harus terus diperluas di seluruh Nusantara.

"Peningkatan keterampilan dan kualitas SDM salah satu kunci dalam pengembangan sektor pariwisata nasional," kata dia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang menginisiasi Kampanye Sadar Wisata 5.0 yang difokuskan untuk mengembangkan SDM. Khususnya bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Kampanye itu terkait pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu langkah utama dalam memajukan pariwisata berbasis masyarakat. ■ KAL